

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Adisasmita, Rahardjo, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Ali, Zainuddin , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, cetakan ketiga.
- Al-Rasyid, Harun, *Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, cetakan ketujuh.
- Asshiddiqie Jimly, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, cetakan kedua.
- Effendi, Paulus Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Jakarta: Salemba Humanika, 2013.
- Enrico, Simanjuntak dan Ahmad Marjuki, “ Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pilkadaes,” dalam AL QISTHAS: *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 6 No. 2 (Juli-Desember 2015) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN SMH BANTEN.
- Fachruddin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.
- G, Didik Suharto , *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Harahap, Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Sastra Press, 2015.
- HR, Ridwan, *Hukum Adminisrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, cetakan kesembilan.
- Ishom, Muhammad, *Pengantar Legal Drafting (Taqnin Al-Ahkam)*, Serang : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2014.
- Ismawan, Indra, *Money Politics: Pengaruh Uang dalam Pemilu*, Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.
- Jeddawi, Murtir, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Total Media, 2012.
- Kadir, Abdul Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Khaleed, Badriyah, *Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, cetakan ketujuh.
- M, Josef Monteiro, *Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
- Mustafa, Ahmad Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 1,2, dan 3*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993, cetakan kedua.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Rifai, Amzulian, *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Siti, A Soetami, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2009, cetakan keenam.

- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, cetakan keempat.
- Surianingrat, Bayu, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- Suyuthi, Wildan Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana.
- Tholkhah, Imam, *Anotomi Konflik Politik di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Titik, Triwulan T, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Triwulan, Titik T dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Widjaja, HAW, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Wiyono R, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

**Internet :**

*<http://cekkamus.com/istilah-politik/manipulasi+suara/>*, diunduh pada 17 Januari 2017, pukul 11:49 WIB.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

**Sumber Bacaan:**

Salinan Putusan Perkara Nomor : 35/G/2013/PTUN-SRG.

Salinan Putusan perkara nomor : 59/B/2014/ PT.TUN. JKT.

Salinan Putusan Perkara Nomor : 453 K/ TUN/ 2014.

